

STATISTIK KEUANGAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2020-2022



STATISTIK KEUANGAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2020-2022



STATISTIK KEUANGAN DAERAH PROVINSI PAPUA 2022

No. ISSN : -
No. Publikasi : 94000.2336
No. Katalog : 7203007.94
Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman : xii + 84 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Gambar Kulit :

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Diterbitkan oleh :

©BPS Provinsi Papua

Dicetak oleh:

-

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Pengarah:
Adriana Helena Carolia

Penanggung Jawab:
Ikfina Chairani

Penyunting:
Muchtar Abdul Kholiq

Pemeriksa Tabel:
Sabrianto Oktofianus Esa

Penulis:
Sabrianto Oktofianus Esa

Pengolah Data:
Yustina Anggriyani Kowi

Gambar Kulit:
Yustina Anggriyani Kowi

Penata Letak:
Sabrianto Oktofianus Esa

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Daerah Provinsi Papua 2022 ini merupakan publikasi pertama yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua untuk memenuhi kebutuhan konsumen data terhadap statistik keuangan pemerintah daerah, baik Pemerintah Provinsi Papua maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua.

Data yang disajikan pada publikasi ini mencakup realisasi pendapatan dan belanja pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota tahun anggaran 2022 serta anggaran pendapatan dan belanja daerah 2022. Data tersebut merupakan hasil kompilasi dan akumulasi data yang diterima dari Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua melalui BPS Kabupaten/Kota dan BPS Provinsi, yang selanjutnya diolah di BPS.

Publikasi ini memuat penjelasan tentang konsep dan definisi serta metode pengumpulan data guna mempermudah pemahaman para pemakai data. Diharapkan publikasi ini dapat memenuhi kebutuhan konsumen data, khususnya data keuangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, baik untuk keperluan perencanaan dan analisis maupun evaluasi perkembangan perekonomian secara umum.

Terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, hingga publikasi ini dapat diselesaikan. Kami sangat mengharapkan saran dari berbagai pihak guna penyempurnaan dan pengembangan publikasi yang akan datang.

Papua, Juli 2023

KEPALA BPS PROVINSI PAPUA

Adriana H. Carolina, S.E., M.M.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar	ix
Daftar Lampiran	x
PENJELASAN UMUM DAN ULASAN RINGKAS	
I Penjelasan Umum	3
1.1. Pendahuluan	3
1.2. Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data	3
1.3. Konsep dan Definisi	4
II Ulasan Ringkas	13
2.1. Keuangan Pemerintah Provinsi Papua	13
2.1.1. Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Papua	13
2.1.2. Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua	15
2.2. Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua	17
2.2.1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota	17
2.2.2. Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua	19
2.3. Peta Pemetaan Pendapatan dan Belanja Daerah	22
Lampiran Tabel	25

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Papua Menurut Jenis Penerimaan, 2020 - 2022 (Juta Rupiah)	14
Tabel 3.2. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Papua Menurut Jenis Pengeluaran, 2020 - 2022 (Juta Rupiah)	16
Tabel 3.3. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Menurut Jenis Penerimaan, 2020 - 2022 (Juta Rupiah)	18
Tabel 3.4. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Menurut Jenis Belanja, 2020 - 2022 (Juta Rupiah)	20

<https://papua.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1. Persentase Sumber Pendapatan Daerah Provinsi Papua, 2022	15
Gambar 3.2. Alokasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua, 2022	17
Gambar 3.3. Persentase Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua, 2022	19
Gambar 3.4. Alokasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua, 2022	21
Gambar 3.5. Peta Pemetaan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Papua, 2022	22
Gambar 3.6. Peta Pemetaan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Papua, 2022	23

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN TABEL	
1. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Merauke, 2020 - 2022	27
2. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Merauke, 2020 - 2022	28
3. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Jayapura, 2020 - 2022	29
4. Realisasi Pengeuaran Pemerintah Kota Jayapura, 2020 - 2022	30
5. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Jayapura, 2020 - 2022	31
6. Realisasi Pengeuaran Pemerintah Kabupaten Jayapura, 2020 - 2022	32
7. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Sarmi, 2020 - 2022	33
8. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Sarmi, 2020 - 2022	34
9. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Mimika, 2020 - 2022	35
10. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Mimika, 2020 - 2022	36
11. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Keerom, 2020 - 2022	37
12. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Keerom, 2020 - 2022	38
13. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, 2020 - 2022	39
14. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, 2020 - 2022	40
15. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Nabire, 2020 - 2022	41
16. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Nabire, 2020 - 2022	42
17. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, 2020 - 2022	43
18. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, 2020 - 2022	44
19. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Mappi, 2020 - 2022	45
20. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Mappi, 2020 - 2022	46
21. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Asmat, 2020 - 2022	47
22. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Asmat, 2020 - 2022	48
23. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, 2020 - 2022	49
24. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, 2020 - 2022	50
25. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya, 2020 - 2022	51
26. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya, 2020 - 2022	52
27. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Dogiyai, 2020 - 2022	53
28. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Dogiyai, 2020 - 2022	54
29. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Waropen, 2020 - 2022	55
30. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Waropen, 2020 - 2022	56

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN TABEL	
31. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, 2020 - 2022	57
32. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, 2020 - 2022	58
33. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Tolikara, 2020 - 2022	59
34. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Tolikara, 2020 - 2022	60
35. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Yalimo, 2020 - 2022	61
36. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Yalimo, 2020 - 2022	62
37. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, 2020 - 2022	63
38. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, 2020 - 2022	64
39. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah, 2020 - 2022	65
40. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah, 2020 - 2022	66
41. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Paniai, 2020 - 2022	67
42. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Paniai, 2020 - 2022	68
43. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Nduga, 2020 - 2022	69
44. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Nduga, 2020 - 2022	70
45. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Supiori, 2020 - 2022	71
46. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Supiori, 2020 - 2022	72
47. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Puncak, 2020 - 2022	73
48. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Puncak, 2020 - 2022	74
49. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, 2020 - 2022	75
50. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, 2020 - 2022	76
51. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, 2020 - 2022	77
52. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Yahukimo, 2020 - 2022	78
53. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, 2020 - 2022	79
54. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, 2020 - 2022	80
55. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, 2020 - 2022	81
56. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, 2020 - 2022	82
57. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Deiyai, 2020 - 2022	83
58. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Deiyai, 2020 - 2022	84



**PENJELASAN UMUM
&
ULASAN RINGKAS**

<http://barua.kes.go.id>

I. PENJELASAN UMUM

1.1. Pendahuluan

Dalam melaksanakan pembangunan daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menduduki posisi penting sebagai instrumen kebijakan untuk membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing daerah, serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang transparan, berorientasi pada kepentingan rakyat dan akuntabilitas publik.

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerah masing-masing. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan daerahnya dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Publikasi Statistik Keuangan Daerah Provinsi Papua secara umum menyajikan data tentang Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua pada tahun 2022 dan 2021. Publikasi ini memberikan informasi antara lain:

- a. Memberikan gambaran tentang realisasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Untuk mengetahui potensi dan peranan sumber dana dari masing-masing daerah.
- c. Sebagai salah satu indikator untuk mengambil kebijakan sesuai dengan potensi keuangan pada masing-masing daerah.

1.2. Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data

Kompilasi data anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Provinsi Papua diperoleh dari hasil pencacahan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dengan menggunakan Daftar APBD-1 dan Daftar K-1. Sumber data diperoleh dari Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Papua. Kompilasi data anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja pemerintah kabupaten/kota diperoleh dari Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua dan hasil pencacahannya dicatat dengan menggunakan Daftar APBD-2 dan Daftar K-2. Kuesioner yang telah terisi dikirim ke BPS-RI melalui BPS Provinsi untuk diolah.

1.3. Konsep dan Definisi

Bagian ini berisi beberapa konsep dan definisi dari istilah-istilah yang digunakan dalam Publikasi Statistik Keuangan Daerah Provinsi Papua. Istilah-istilah tersebut adalah istilah yang berkaitan dengan kegiatan keuangan pemerintah daerah baik dari sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran.

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah adalah realisasi/perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tiap tahun anggaran.

A. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1.1. Pajak Daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Penerimaan pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel, restoran, reklame, penerangan jalan, galian golongan C dan lain-lain.

1.2. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh Pemda secara langsung dan nyata kepada pembayar. Retribusi daerah antara lain retribusi pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan

alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta, pelayanan pendidikan, pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan/atau pertokoan, terminal, rumah potong hewan, tempat rekreasi/olah raga, ijin mendirikan bangunan, ijin peruntukan penggunaan tanah, ijin trayek dan lain-lain.

1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan laba milik daerah lainnya, dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pendapatan daerah yang meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri atas Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana ALokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Bagi Hasil Pajak terdiri atas penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh pasal 21), dan lain-lain. Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri atas iuran hak pengusahaan hutan (IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH), pemberian hak atas tanah Negara, *landrent*, iuran eksplorasi/eksploitasi/royalti, pungutan pengusaha perikanan dan hasil perikanan, hasil pertambangan minyak bumi/gas alam, dan lain-lain.

2.2. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah

daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum.
2. Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.
3. Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

2.4. Dana Insentif Daerah (DID) diarahkan untuk melanjutkan kebijakan mendorong kemandirian daerah dan peningkatan kualitas belanja APBD, penguatan indikator yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional dan mengedepankan kriteria kinerja yang dinamis dan strategis untuk mendorong tata kelola pemerintah daerah yang lebih baik dan mendorong agar daerah lebih kompetitif seperti kinerja pengendalian inflasi indeks pencegahan korupsi, dan interkoneksi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

2.5. Dana otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur diarahkan untuk mendukung peningkatan tata kelola Dana Otsus, mendukung pemulihan ekonomi di daerah melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya pasar tradisional, dan mendukung pembangunan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi untuk perluasan akses dan peningkatan efektifitas layanan Pendidikan dan Kesehatan serta pembangunan infrastruktur listrik pedesaan di wilayah Papua, dan Papua Barat.

2.6. Dana Desa ditujukan untuk meningkatkan perekonomian desa, dan penggunaannya difokuskan untuk mendukung pemulihan ekonomi desa melalui Bantuan Langsung Tunai Desa dan pengembangan sektor prioritas di desa seperti pengembangan desa digital dan desa wisata

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan/atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya.

Lain-lain pendapatan yang sah mencakup pendapatan hibah; dana darurat yang merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa dan/atau krisis solvabilitas; dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya; dana penyesuaian dan otonomi khusus; bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya; dan pendapatan yang sah lainnya.

B. Belanja Daerah

1. Belanja Tidak Langsung adalah bagian belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan pengeluaran tidak terduga, yang dianggarkan tidak terkait langsung pelaksanaan program dan kegiatan.

1.1. Belanja Pegawai Tidak Langsung adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk disini adalah uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

1.2. Belanja Bunga adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) dan berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

1.3. Belanja Subsidi adalah belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak, yang menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.

1.4. Belanja Hibah adalah belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain

sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah/BUMN/BUMD, badan/lembaga/organisasi swasta, ataupun kelompok masyarakat/perorangan.

1.5. Belanja Bantuan Sosial adalah belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang lainnya dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota, kepada desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, terdiri dari:

- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi.
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota.
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa.
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota.
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa.

1.7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi, kepada pemerintah kabupaten/kota, atau pemerintah desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan.

Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Bantuan keuangan ini terdiri atas:

- Bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi.
- Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota.
- Bantuan keuangan kepada pemerintah desa.
- Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/pemerintah desa lainnya.

1.8. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak

diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

1.9. Belanja Lainnya adalah Pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial serta bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.

2. Belanja Langsung adalah bagian belanja pegawai, belanja barang dan belanja jasa, serta belanja modal yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program.

2.1. Belanja Pegawai adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

2.2. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai dan lain-lain belanja barang dan jasa.

2.3. Belanja Modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, mebeulair, peralatan dapur,

penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepuustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/keamanan.

C. Belanja Menurut Fungsi

- 1. Pelayanan Umum** adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk perencanaan pembangunan, otonomi daerah, pemerintahan umum dan administrasi keuangan daerah, komunikasi dan lain-lain.
- 2. Ketertiban dan Keamanan** adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan pemeliharaan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta sejenisnya.
- 3. Ekonomi** adalah daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan sektor perhubungan, ketenagakerjaan, koperasi dan UKM, penanaman modal, pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri, ketransmigrasian dan lainnya.
- 4. Lingkungan Hidup** adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan penataan ruang, lingkungan hidup dan sejenisnya.
- 5. Perumahan dan Fasilitas Umum** adalah daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan pekerjaan umum, perumahan dan sejenisnya.
- 6. Kesehatan** adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program kesehatan dan sejenisnya.
- 7. Pariwisata dan Budaya** adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program pariwisata dan sejenisnya.
- 8. Pendidikan** adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan sector pendidikan, pemuda dan olahraga, perpustakaan dan lainnya.
- 9. Perlindungan Sosial** adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program pemberdayaan perempuan, sosial dan lainnya.

D. Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya adalah bagian penerimaan anggaran yang didapat dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa laba kegiatan lanjutan.

1.2. Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah semua penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah adalah semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan

1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman adalah semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat, provinsi dan/atau pemerintah daerah lainnya.

1.6. Penerimaan Piutang Daerah adalah semua penerimaan yang berasal dari pemberian piutang daerah kepada pemerintah yang lebih tinggi maupun lebih rendah serta swasta.

1.7. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir adalah semua penerimaan kembali yang berasal dari investasi dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat

dan tujuan lainnya.

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah.

2.1. Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah adalah pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini dapat berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), saham, penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

2.3. Pembayaran Pokok Utang adalah pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

2.4. Pemberian Pinjaman Daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak ketiga.

3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan digunakan untuk mengetahui pembiayaan neto, yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

II. ULASAN RINGKAS

2.1. Keuangan Pemerintah Provinsi Papua

Kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan APBD merupakan gambaran langkah kongkret pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah Provinsi Papua terus berupaya dalam menentukan target penerimaan daerah untuk menaikkan belanja daerah. Otonomi daerah dalam bentuk desentralisasi fiskal memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur keuangan daerahnya. Berbagai cara dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dalam upaya pemenuhan pembiayaan pelayanan publiknya.

2.1.1. Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Papua

Pada tahun 2022, tingkat realisasi pendapatan daerah pemerintah Provinsi Papua tercatat sebesar 11,18 triliun atau 106,09 persen. Artinya tingkat realisasi pendapatan pemerintah Provinsi Papua tahun 2022 ini sudah melebihi 6,09 persen dibandingkan anggaran tahun 2022 yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tingkat realisasi pendapatan pemerintah Provinsi Papua tahun 2021, tingkat realisasi pendapatan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 4,31 persen.

Sama halnya dengan tingkat realisasi pendapatan daerah, tingkat realisasi PAD Pemerintah Provinsi Papua tahun 2022 tercatat telah melebihi anggaran yang ditetapkan. Tingkat realisasi PAD pemerintah Provinsi Papua tahun 2022 adalah 179,97 persen. Dari ketiga sumber pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Papua tahun 2022, tercatat bahwa PAD memiliki tingkat realisasi yang terbesar.

Total penerimaan Pemerintah Provinsi Papua tahun 2022 adalah 10,54 triliun. Komponen terbesar dari total anggaran penerimaan pemerintah Provinsi Papua ini adalah pendapatan transfer. Kontribusi transfer terhadap total penerimaan pemerintah Provinsi Papua adalah 88,26 persen atau sebesar 9,30 triliun rupiah. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan yang sah memberikan kontribusi sebesar 11,74 persen dan 0 persen atau sebesar 1,24 triliun rupiah dan 0 rupiah pada tahun 2022.

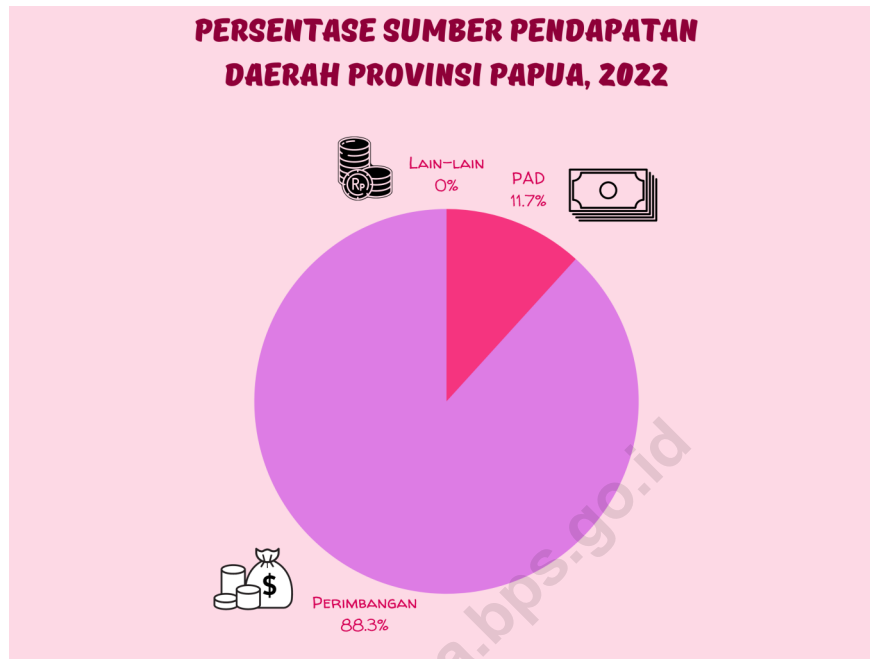
Tabel 3.1
Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Papua Menurut Jenis Penerimaan, 2020-2022
(Juta Rupiah)

Jenis Penerimaan	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. PENDAPATAN DAERAH			
<i>1. Pendapatan Asli Daerah</i>	1 388 500	2 139 700	2 226 750
1.1. Pajak Daerah	986 670	1 627 370	17 710
1.2. Retribusi Daerah	40 020	38 780	766 990
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelo-laan Kekayaan	31 980	40 490	206 560
1.4 Lain-lain PAD yang Sah	329 830	433 060	1 000 180
<i>2. Dana Perimbangan</i>	12 180 940	12 995 410	8 949 980
2.1. Bagi Hasil Pajak	269 060	684 570	569 940
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	518 150	417 070	1 509 440
2.3. Dana Alokasi Umum	2 330 020	2 314 920	2 314 920
2.4. Dana Alokasi Khusus	1 063 740	1 651 330	751 530
2.5. Dana Otonomi Khusus	7 999 970	7 911 840	3 792 660
2.6. Dana Insentif Daerah	-	15 680	11 490
<i>3. Lain-lain Pendapatan yang Sah</i>	4 760	10 980	4 470
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	13 574 200	15 146 090	11 181 200

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Sementara itu, total realisasi anggaran penerimaan Pemerintah Provinsi Papua pada tahun 2022 adalah sebesar 11,18 triliun rupiah. Komponen pendapatan transfer juga mendominasi total realisasi anggaran penerimaan pemerintah Provinsi Papua ini dengan kontribusi sebesar 80,04 persen atau 8,95 triliun rupiah, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi komponen terbesar kedua terhadap total realisasi anggaran penerimaan pemerintah Provinsi Papua pada tahun 2022 dengan kontribusi sebesar 19,92 persen atau 2,23 triliun rupiah. Selain itu, penerimaan yang berasal dari lain-lain pendapatan yang sah memberikan kontribusi terhadap total realisasi anggaran penerimaan pemerintah Provinsi Papua yaitu sebesar 0,04 persen atau 4,47 miliar rupiah pada tahun 2022.

Gambar 3.1
Persentase Sumber Pendapatan Daerah Provinsi Papua, 2022



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

2.1.2. Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi equitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Total realisasi pengeluaran pemerintah Provinsi Papua pada tahun 2022 adalah sebesar 11,37 triliun rupiah. Selanjutnya, pada tahun 2022 total pengeluaran pemerintah Provinsi Papua dianggarkan sebesar 9,82 triliun rupiah. Realisasi belanja langsung pada tahun 2022 adalah sebesar 8,85 triliun rupiah. Kontribusi belanja langsung ini terhadap total realisasi pengeluaran Pemerintah Provinsi Papua adalah sebesar 77,80 persen. Selanjutnya realisasi belanja tidak langsung sebesar 2,52 triliun rupiah pada tahun 2022 dengan kontribusi sebesar 22,20 persen. Komponen belanja operasi yang paling dominan adalah belanja barang dan jasa dilanjutkan dengan belanja pegawai baik pada realisasi pengeluaran tahun 2022 maupun anggaran pengeluaran tahun 2022.

Tabel 3.2
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Papua Menurut Jenis Pengeluaran, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	6 011 430	6 800 530	2 524 780
1. Belanja Bunga	0	0	-
2. Belanja Subsidi	0	250 000	-
3. Belanja Hibah	2 694 910	3 695 920	1 634 320
4. Belanja Bantuan Sosial	51 840	119 940	43 750
5. Belanja Bagi Hasil	472 570	814 340	650 690
6. Belanja Bantuan Keuangan	2 603 500	2 050 960	-
7. Belanja Lainnya	0	-	-
8. Pengeluaran Tidak Terduga	188 610	119 120	196 020
B. BELANJA LANGSUNG	6 595 560	8 059 080	8 849 500
1. Belanja Pegawai	2 215 240	2 277 400	2 413 290
2. Belanja Barang dan Jasa	3 541 110	4 665 310	4 434 710
3. Belanja Modal	839 210	1 116 370	2 001 500
JUMLAH	12 606 990	14 859 610	11 374 280

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Total belanja daerah Pemerintah Provinsi Papua tahun 2022 adalah 9,82 triliun. Komponen terbesar dari total anggaran belanja daerah pemerintah Provinsi Papua ini adalah belanja langsung. Kontribusi belanja langsung terhadap total belanja daerah pemerintah Provinsi Papua adalah 81,54 persen atau sebesar 8,00 triliun rupiah. Selain itu, belanja tidak langsung memberikan kontribusi sebesar 18,46 persen atau sebesar 1,81 triliun rupiah pada tahun 2022.

Sementara itu, total realisasi anggaran belanja daerah Pemerintah Provinsi Papua pada tahun 2022 adalah sebesar 11,37 triliun rupiah. Komponen belanja langsung juga mendominasi total realisasi anggaran penerimaan pemerintah Provinsi Papua ini dengan kontribusi sebesar 77,80 persen atau 8,85 triliun rupiah, sedangkan belanja tidak langsung menjadi komponen terbesar kedua terhadap total realisasi anggaran belanja daerah pemerintah Provinsi Papua pada tahun 2022 dengan kontribusi sebesar 22,20 persen atau 2,52 triliun rupiah.

Gambar 3.2
Alokasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua, 2022



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

2.2. Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua

Dalam menjalankan APBD, pemerintah dituntut menjadi motor utama dalam menggerakkan perekonomian daerahnya masing-masing agar dapat terus tumbuh dari tahun ke tahun. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang semakin meningkat mendorong pemerintah untuk menaikkan belanja pemerintah. Peningkatan belanja pemerintah daerah ini tentunya ditunjang oleh peningkatan pendapatan.

2.2.1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pada tahun 2022, tingkat realisasi pendapatan daerah pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua tercatat sebesar 55,56 triliun atau 98,02 persen. Artinya tingkat realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua tahun 2022 ini masih kurang 1,98 persen dibandingkan anggaran tahun 2022 yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tingkat realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua tahun 2021, tingkat realisasi pendapatan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 2,67 persen.

Sama halnya dengan tingkat realisasi pendapatan daerah, tingkat realisasi PAD Pemerintah

Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua tahun 2022 tercatat telah melebihi anggaran yang ditetapkan. Tingkat realisasi PAD pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua tahun 2022 adalah 116,02 persen. Dari ketiga sumber pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua tahun 2022, tercatat bahwa lain-lain pendapatan yang sah memiliki tingkat realisasi yang terbesar.

Total penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua tahun 2022 adalah 56,68 triliun. Komponen terbesar dari total anggaran penerimaan pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua ini adalah pendapatan transfer. Kontribusi transfer terhadap total penerimaan pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua adalah 90,47 persen atau sebesar 51,28 triliun rupiah. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan yang sah memberikan kontribusi sebesar 7,27 persen dan 2,26 persen atau sebesar 4,12 triliun rupiah dan 1,28 triliun rupiah pada tahun 2022.

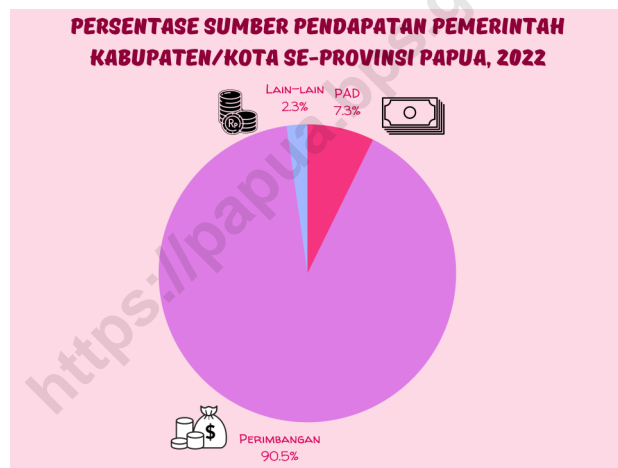
Tabel 3.3
Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua
Menurut Jenis Penerimaan, 2020 - 2022 (Juta Rupiah)

Jenis Penerimaan	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. PENDAPATAN DAERAH			
<i>1. Pendapatan Asli Daerah</i>	2 711 040	4 092 240	4 784 090
1.1. Pajak Daerah	1 457 090	2 318 530	1 936 230
1.2. Retribusi Daerah	162 550	163 170	134 930
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	102 300	583 830	1 822 440
1.4 Lain-lain PAD yang Sah	989 100	1 026 710	890 490
<i>2. Dana Perimbangan</i>	42 617 110	44 806 650	49 224 810
2.1. Bagi Hasil Pajak	881 680	2 941 790	2 370 440
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2 154 110	1 975 640	7 322 510
2.3. Dana Alokasi Umum	20 797 200	20 494 060	20 502 050
2.4. Dana Alokasi Khusus	5 246 460	5 923 890	5 957 580
2.5. Dana Otonomi Khusus	7 999 970	7 911 840	8 187 590
2.6. Dana Insentif Daerah	8 999 970	129 700	90 870
2.7. Dana Desa	5 350 360	5 429 730	4 793 770
<i>3. Lain-lain Pendapatan yang Sah</i>	2 090 210	2 135 770	1 547 660
JUMLAH	47 418 360	51 034 660	55 556 560

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Sementara itu, total realisasi anggaran penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua pada tahun 2022 adalah sebesar 55,56 triliun rupiah. Komponen pendapatan transfer juga mendominasi total realisasi anggaran penerimaan pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua ini dengan kontribusi sebesar 88,60 persen atau 49,22 triliun rupiah, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi komponen terbesar kedua terhadap total realisasi anggaran penerimaan pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua pada tahun 2022 dengan kontribusi sebesar 8,61 persen atau 4,78 triliun rupiah. Selain itu, penerimaan yang berasal dari lain-lain pendapatan yang sah memberikan kontribusi terhadap total realisasi anggaran penerimaan pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua yaitu sebesar 2,79 persen atau 1,55 triliun rupiah pada tahun 2022.

Gambar 3.3
Persentase Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua, 2022



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

2.2.2. Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua

Total realisasi pengeluaran pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua pada tahun 2022 adalah sebesar 47,43 triliun rupiah. Selanjutnya, pada tahun 2022 total pengeluaran pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua dianggarkan sebesar 50,14 triliun rupiah. Realisasi belanja langsung pada tahun 2022 adalah sebesar 37,54 triliun rupiah. Kontribusi belanja langsung ini terhadap total realisasi pengeluaran pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua adalah sebesar 79,15 persen. Selanjutnya realisasi belanja tidak langsung sebesar 9,89 triliun rupiah pada tahun 2022 dengan kontribusi sebesar 20,85 persen. Komponen belanja operasi yang paling dominan adalah belanja barang dan jasa dilanjutkan dengan belanja pegawai baik pada realisasi pengeluaran tahun 2022

maupun anggaran pengeluaran tahun 2022.

Tabel 3.4
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua
Menurut Jenis Belanja, 2020 - 2022 (Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	16 498 630	16 225 920	9 891 180
1. Belanja Bunga	59 030	61 330	30 130
2. Belanja Subsidi	59 750	37 530	30 640
3. Belanja Hibah	4 341 550	4 784 620	3 316 110
4. Belanja Bantuan Sosial	899 750	776 470	807 410
5. Belanja Bagi Hasil	550 070	1 000 310	674 770
6. Belanja Bantuan Keuangan	9 412 670	8 960 950	4 514 090
7. Belanja Lainnya	0	-	-
8. Pengeluaran Tidak Terduga	1 175 810	604 710	518 030
B. BELANJA LANGSUNG	31 065 640	34 107 530	37 537 260
1. Belanja Pegawai	11 481 640	11 239 610	11 285 140
2. Belanja Barang dan Jasa	13 182 850	15 804 070	16 938 720
3. Belanja Modal	6 401 150	7 063 850	9 313 400
JUMLAH	47 564 270	50 333 450	47 428 440

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Total belanja daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua tahun 2022 adalah 50,14 triliun. Komponen terbesar dari total anggaran belanja daerah pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua ini adalah belanja langsung. Kontribusi belanja langsung terhadap total belanja daerah pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua adalah 77,51 persen atau sebesar 50,14 triliun rupiah. Selain itu, belanja tidak langsung memberikan kontribusi sebesar 22,49 persen atau sebesar 11,28 triliun rupiah pada tahun 2022.

Sementara itu, total realisasi anggaran belanja daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua pada tahun 2022 adalah sebesar 47,43 triliun rupiah. Komponen belanja langsung juga mendominasi total realisasi anggaran penerimaan pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua ini dengan kontribusi sebesar 79,15 persen atau 37,54 triliun rupiah, sedangkan belanja tidak langsung menjadi komponen terbesar kedua terhadap total realisasi anggaran belanja daerah pemerintah

Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua pada tahun 2022 dengan kontribusi sebesar 20,85 persen atau 9,89 triliun rupiah.

Gambar 3.4
Alokasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua, 2022



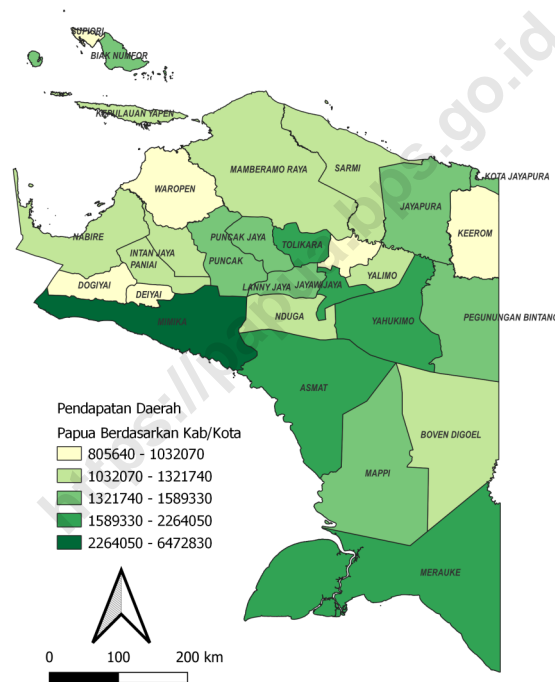
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Pada tahun 2022, dari sebelas kabupaten/kota se-Provinsi Papua, anggaran belanja daerah tertinggi adalah Kota Papua, diikuti Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin. Sedangkan kabupaten/kota dengan belanja daerah terendah adalah Kota Sungai Penuh. Beberapa pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan sebagian besar anggaran belanja tahun 2022 untuk belanja tidak langsung, yaitu Kabupaten Kerinci sebesar 68,46 persen, Kabupaten Merangin 57,65 persen, Kabupaten Sarolangun sebesar 58,82 persen, Kabupaten Muaro Papua sebesar 58,15 persen, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 56,61 persen, Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 59,88 persen, Kabupaten Tebo sebesar 63,81 persen, Kabupaten Bungo sebesar 69,64 persen dan Kota Sungai Penuh sebesar 54,83 persen. Sementara itu, kabupaten/kota yang mengalokasikan sebagian besar anggaran belanja tahun 2022 untuk belanja langsung yaitu Kabupaten Batang Hari sebesar 51,10 persen dan Kota Papua sebesar 61,40 persen.

2.3. Peta Pemetaan Pendapatan dan Belanja Daerah

Peta dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang bagaimana dana belanja dan pendapatan didistribusikan di wilayah tertentu. Dalam konteks ini, QGIS adalah alat yang sangat berguna untuk membuat peta yang informatif dan mudah dimengerti. QGIS adalah perangkat lunak pemetaan *open-source* yang kuat dan fleksibel, yang memberikan kemampuan untuk menggabungkan data spasial dengan informasi keuangan, dan menciptakan visualisasi yang menarik.

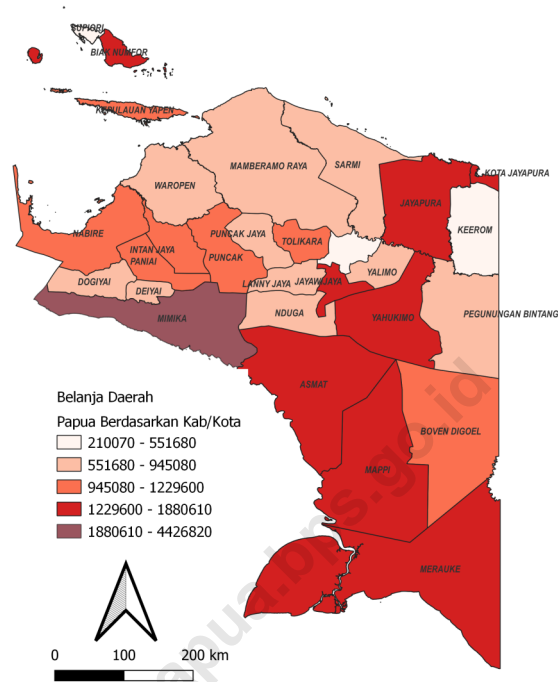
Gambar 3.5
Peta Pemetaan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Papua, 2022



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Wilayah dengan tingkat pendapatan terbesar ialah Kabupaten Mimika sedangkan pendapan terendah berada pada Kabupaten Waropen, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deyai, Mamberamo Tengah dan Kabupaten Keerom.

Gambar 3.6
Peta Pemetaan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Papua, 2022



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Wilayah dengan tingkat belanja terbesar ialah Kabupaten Mimika sedangkan belanja terendah berada pada Kabupaten Keerom dan Mamberamo Tengah.

<https://papua.bps.go.id>



LAMPIRAN TABEL

<https://papua.bpp.go.id>

Tabel 1
Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Merauke, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Penerimaan	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. PENDAPATAN DAERAH			
<i>1. Pendapatan Asli Daerah</i>	128 340	141 760	191 830
1.1. Pajak Daerah	26 740	45 750	58 790
1.2. Retribusi Daerah	12 350	9 660	10 780
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8 750	9 910	59 170
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	80 500	76 440	63 090
<i>2. Dana Perimbangan</i>	1 651 890	1 649 900	1 965 080
2.1. Bagi Hasil Pajak	21 450	59 520	47 570
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	38 510	33 070	107 870
2.3. Dana Alokasi Umum	1 136 920	1 121 070	1 122 850
2.4. Dana Alokasi Khusus	228 870	200 790	335 980
2.5. Dana Otonomi Khusus	-	-	144 310
2.6. Dana Insentif Daerah	-	-	22 020
2.7. Dana Desa	226 140	235 450	184 480
<i>3. Lain-lain Pendapatan yang Sah</i>	71 610	82 120	107 140
JUMLAH	1 851 840	1 873 780	2 264 050

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 2
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Merauke, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	459 790	422 910	407 310
1. Belanja Bunga	110	-	1 060
2. Belanja Subsidi	0	-	-
3. Belanja Hibah	107 440	20 930	45 180
4. Belanja Bantuan Sosial	8 640	37 700	36 190
5. Belanja Bagi Hasil	0	-	-
6. Belanja Bantuan Keuangan	343 600	364 280	320 310
7. Belanja Lainnya	0	-	-
8. Pengeluaran Tidak Terduga	0	-	4 570
B. BELANJA LANGSUNG	1 541 730	1 360 650	1 880 610
1. Belanja Pegawai	545 400	592 510	594 900
2. Belanja Barang dan Jasa	667 730	531 520	813 030
3. Belanja Modal	328 600	236 620	472 680
JUMLAH	2 001 520	1 783 560	2 287 920

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 3
Realisasasi Penerimaan Pemerintah Kota Jayapura, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Penerimaan	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. PENDAPATAN DAERAH			
<i>1. Pendapatan Asli Daerah</i>	173 770	250 670	300 960
1.1. Pajak Daerah	124 060	191 680	220 470
1.2. Retribusi Daerah	16 020	22 820	23 490
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4 840	6 210	6 620
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	28 850	29 960	50 380
<i>2. Dana Perimbangan</i>	878 650	897 440	1 083 380
2.1. Bagi Hasil Pajak	38 290	50 330	60 160
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	35 280	28 200	104 770
2.3. Dana Alokasi Umum	592 100	580 490	580 490
2.4. Dana Alokasi Khusus	162 670	202 260	189 750
2.5. Dana Otonomi Khusus	-	-	121 840
2.6. Dana Insentif Daerah	23 940	8 680	13 520
2.7. Dana Desa	26 370	27 480	12 850
<i>3. Lain-lain Pendapatan yang Sah</i>	191 060	133 870	146 980
JUMLAH	1 243 480	1 281 980	1 531 320

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 4
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Jayapura, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	186 360	173 710	184 440
1. Belanja Bunga	-	-	-
2. Belanja Subsidi	-	-	-
3. Belanja Hibah	35 020	31 480	64 250
4. Belanja Bantuan Sosial	3 230	4 000	9 530
5. Belanja Bagi Hasil	74 550	20 460	22 850
6. Belanja Bantuan Keuangan	43 160	91 360	77 670
7. Belanja Lainnya	-	-	-
8. Pengeluaran Tidak Terduga	30 400	26 410	10 140
B. BELANJA LANGSUNG	963 510	1 151 250	1 185 190
1. Belanja Pegawai	460 780	487 120	486 520
2. Belanja Barang dan Jasa	401 900	415 380	498 670
3. Belanja Modal	100 830	248 750	200 000
JUMLAH	1 149 870	1 324 960	1 369 630

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 5
Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Jayapura, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Penerimaan	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. PENDAPATAN DAERAH			
<i>1. Pendapatan Asli Daerah</i>	96 810	125 480	150 140
1.1. Pajak Daerah	26 520	43 810	47 290
1.2. Retribusi Daerah	6 940	8 340	7 820
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3 460	4 150	43 800
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	59 890	69 180	51 230
<i>2. Dana Perimbangan</i>	983 260	1 005 830	1 220 230
2.1. Bagi Hasil Pajak	13 810	29 490	21 860
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	26 980	29 970	106 910
2.3. Dana Alokasi Umum	637 730	628 450	629 530
2.4. Dana Alokasi Khusus	162 190	158 180	224 000
2.5. Dana Otonomi Khusus	-	-	121 660
2.6. Dana Insentif Daerah	10 030	25 220	-
2.7. Dana Desa	132 520	134 520	116 270
<i>3. Lain-lain Pendapatan yang Sah</i>	330 490	52 960	62 680
JUMLAH	1 410 560	1 184 270	1 433 050

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 6
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Jayapura, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	297 180	235 020	282 580
1. Belanja Bunga	730	3 430	330
2. Belanja Subsidi	-	3 950	-
3. Belanja Hibah	21 070	22 250	75 940
4. Belanja Bantuan Sosial	12 400	8 550	2 000
5. Belanja Bagi Hasil	-	0	0
6. Belanja Bantuan Keuangan	214 600	193 890	191 320
7. Belanja Lainnya	-	-	-
8. Pengeluaran Tidak Terduga	48 380	2 950	12 990
B. BELANJA LANGSUNG	995 810	1 071 830	1 146 940
1. Belanja Pegawai	395 060	380 860	386 000
2. Belanja Barang dan Jasa	345 200	439 800	454 150
3. Belanja Modal	255 550	251 170	306 790
JUMLAH	1 292 990	1 306 850	1 429 520

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 7
Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Sarami, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Penerimaan	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. PENDAPATAN DAERAH			
<i>1. Pendapatan Asli Daerah</i>	17 390	14 230	9 510
1.1. Pajak Daerah	2 600	2 360	3 140
1.2. Retribusi Daerah	850	490	290
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4 030	5 030	5 080
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	9 910	6 350	1 000
<i>2. Dana Perimbangan</i>	948 040	904 970	1 099 260
2.1. Bagi Hasil Pajak	17 610	23 260	18 590
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	30 290	41 150	117 190
2.3. Dana Alokasi Umum	643 300	631 560	631 560
2.4. Dana Alokasi Khusus	138 270	98 190	107 760
2.5. Dana Otonomi Khusus	-	-	127 340
2.6. Dana Insentif Daerah	12 590	-	11 390
2.7. Dana Desa	105 980	110 810	85 430
<i>3. Lain-lain Pendapatan yang Sah</i>	29 950	19 670	54 430
JUMLAH	995 380	938 870	1 163 200

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 8
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Sarmi, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	242 440	255 320	186 960
1. Belanja Bunga	0	-	-
2. Belanja Subsidi	0	-	-
3. Belanja Hibah	33 910	31 300	22 200
4. Belanja Bantuan Sosial	12 340	8 090	21 800
5. Belanja Bagi Hasil	0	-	-
6. Belanja Bantuan Keuangan	175 980	177 320	130 280
7. Belanja Lainnya	0	-	-
8. Pengeluaran Tidak Terduga	20 210	38 610	12 680
B. BELANJA LANGSUNG	824 230	761 250	689 190
1. Belanja Pegawai	277 300	212 620	207 860
2. Belanja Barang dan Jasa	309 720	402 120	348 510
3. Belanja Modal	237 210	146 510	132 820
JUMLAH	1 066 670	1 016 570	876 150

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 9
Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Mimika, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Penerimaan	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. PENDAPATAN DAERAH			
<i>1. Pendapatan Asli Daerah</i>	311 460	891 290	1 089 110
1.1. Pajak Daerah	211 700	299 580	242 150
1.2. Retribusi Daerah	19 080	18 670	16 360
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5 010	468 140	738 860
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	75 670	104 900	91 740
<i>2. Dana Perimbangan</i>	1 957 940	3 372 190	5 261 950
2.1. Bagi Hasil Pajak	272 470	1 719 900	1 307 770
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	711 770	713 070	2 856 150
2.3. Dana Alokasi Umum	562 080	550 840	550 840
2.4. Dana Alokasi Khusus	206 950	237 310	262 990
2.5. Dana Otonomi Khusus	-	-	140 380
2.6. Dana Insentif Daerah	55 890	-	11 450
2.7. Dana Desa	148 780	151 070	132 370
<i>3. Lain-lain Pendapatan yang Sah</i>	252 260	334 770	121 770
JUMLAH	2 521 660	4 598 250	6 472 830

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 10
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Mimika, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	676 880	523 560	688 540
1. Belanja Bunga	1 920	16 460	-
2. Belanja Subsidi	-	-	-
3. Belanja Hibah	137 820	110 090	271 830
4. Belanja Bantuan Sosial	1 070	42 000	36 360
5. Belanja Bagi Hasil	0	-	-
6. Belanja Bantuan Keuangan	309 710	354 650	378 780
7. Belanja Lainnya	0	-	-
8. Pengeluaran Tidak Terduga	226 360	360	1 570
B. BELANJA LANGSUNG	2 320 010	3 028 000	3 738 280
1. Belanja Pegawai	734 580	770 490	747 300
2. Belanja Barang dan Jasa	941 130	1 103 180	1 587 610
3. Belanja Modal	644 300	1 154 330	1 403 370
JUMLAH	2 996 890	3 551 560	4 426 820

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 11
Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Keerom, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Penerimaan	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. PENDAPATAN DAERAH			
<i>1. Pendapatan Asli Daerah</i>	19 900	22 230	12 470
1.1. Pajak Daerah	6 080	5 280	3 790
1.2. Retribusi Daerah	7 540	8 870	550
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1 960	2 280	2 260
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	4 320	5 800	5 870
<i>2. Dana Perimbangan</i>	753 440	797 140	951 280
2.1. Bagi Hasil Pajak	11 050	18 170	18 940
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	29 710	42 190	112 030
2.3. Dana Alokasi Umum	501 430	492 130	492 220
2.4. Dana Alokasi Khusus	98 700	105 750	119 490
2.5. Dana Otonomi Khusus	-	-	120 310
2.6. Dana Insentif Daerah	14 070	39 210	6 700
2.7. Dana Desa	98 480	99 690	81 590
<i>3. Lain-lain Pendapatan yang Sah</i>	18 400	49 360	47 980
JUMLAH	791 740	868 730	1 011 730

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 12
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Keerom, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	229 050	220 140	143 610
1. Belanja Bunga	12 530	10 010	2 700
2. Belanja Subsidi	0	0	-
3. Belanja Hibah	78 730	36 660	31 490
4. Belanja Bantuan Sosial	14 590	9 480	10 150
5. Belanja Bagi Hasil	0	0	-
6. Belanja Bantuan Keuangan	115 090	146 110	94 920
7. Belanja Lainnya	0	-	-
8. Pengeluaran Tidak Terduga	8 110	17 880	4 350
B. BELANJA LANGSUNG	588 550	593 360	334 980
1. Belanja Pegawai	249 480	288 900	175 150
2. Belanja Barang dan Jasa	173 360	215 240	97 050
3. Belanja Modal	165 710	89 220	62 780
JUMLAH	817 600	813 500	478 590

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 13
Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Penerimaan	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. PENDAPATAN DAERAH			
<i>1. Pendapatan Asli Daerah</i>	30 220	38 430	25 830
1.1. Pajak Daerah	4 970	8 700	12 290
1.2. Retribusi Daerah	1 540	1 330	1 440
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1 790	2 250	2 380
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	21 920	26 150	9 720
<i>2. Dana Perimbangan</i>	1 082 890	1 049 330	1 248 990
2.1. Bagi Hasil Pajak	20 290	30 760	26 460
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	36 960	32 350	107 230
2.3. Dana Alokasi Umum	761 280	746 660	746 660
2.4. Dana Alokasi Khusus	120 530	87 750	116 170
2.5. Dana Otonomi Khusus	-	-	137 720
2.6. Dana Insentif Daerah	-	-	-
2.7. Dana Desa	143 830	151 810	114 750
<i>3. Lain-lain Pendapatan yang Sah</i>	121 480	145 160	18 940
JUMLAH	1 234 590	1 232 920	1 293 760

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 14
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	341 690	286 740	188 050
1. Belanja Bunga	-	-	-
2. Belanja Subsidi	-	-	-
3. Belanja Hibah	88 290	286 740	15 660
4. Belanja Bantuan Sosial	23 540	27 790	17 850
5. Belanja Bagi Hasil	-	-	-
6. Belanja Bantuan Keuangan	225 770	231 890	154 540
7. Belanja Lainnya	-	-	-
8. Pengeluaran Tidak Terduga	4 090	-	-
B. BELANJA LANGSUNG	863 760	909 370	1 003 800
1. Belanja Pegawai	228 250	234 520	248 970
2. Belanja Barang dan Jasa	355 090	463 360	502 490
3. Belanja Modal	280 420	211 490	252 340
JUMLAH	1 205 450	1 196 110	1 191 850

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 15
Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Nabire, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Penerimaan	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. PENDAPATAN DAERAH			
<i>1. Pendapatan Asli Daerah</i>	69 850	87 800	38 980
1.1. Pajak Daerah	15 960	20 410	24 810
1.2. Retribusi Daerah	3 770	4 080	5 060
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2 090	2 530	2 510
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	48 030	60 780	6 600
<i>2. Dana Perimbangan</i>	994 160	1 036 640	1 200 190
2.1. Bagi Hasil Pajak	14 230	24 460	22 330
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	31 110	36 900	115 380
2.3. Dana Alokasi Umum	669 920	661 800	662 360
2.4. Dana Alokasi Khusus	173 220	215 810	187 050
2.5. Dana Otonomi Khusus	-	-	136 360
2.6. Dana Insentif Daerah	11 350	-	-
2.7. Dana Desa	94 330	97 670	76 710
<i>3. Lain-lain Pendapatan yang Sah</i>	54 060	76 350	82 570
JUMLAH	1 118 070	1 200 790	1 321 740

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 16
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Nabire, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	314 610	240 510	303 200
1. Belanja Bunga	11 580	7 050	5 450
2. Belanja Subsidi	0	-	-
3. Belanja Hibah	70 670	50 760	40 110
4. Belanja Bantuan Sosial	32 480	50 760	60 010
5. Belanja Bagi Hasil	0	-	-
6. Belanja Bantuan Keuangan	155 230	166 580	156 110
7. Belanja Lainnya	0	-	-
8. Pengeluaran Tidak Terduga	44 650	3 140	41 520
B. BELANJA LANGSUNG	784 650	904 860	896 980
1. Belanja Pegawai	446 870	407 250	394 560
2. Belanja Barang dan Jasa	244 900	383 940	337 590
3. Belanja Modal	92 880	113 670	164 830
JUMLAH	1 099 260	1 145 370	1 200 180

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 17
Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Penerimaan	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. PENDAPATAN DAERAH			
<i>1. Pendapatan Asli Daerah</i>	98 440	65 840	95 180
1.1. Pajak Daerah	10 070	11 740	15 150
1.2. Retribusi Daerah	3 460	3 980	8 090
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1 640	1 900	1 890
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	83 270	48 220	70 050
<i>2. Dana Perimbangan</i>	1 020 240	1 053 650	1 315 520
2.1. Bagi Hasil Pajak	11 460	16 630	14 530
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	35 280	28 200	104 850
2.3. Dana Alokasi Umum	540 020	532 360	532 360
2.4. Dana Alokasi Khusus	226 540	269 520	344 850
2.5. Dana Otonomi Khusus	-	-	125 530
2.6. Dana Insentif Daerah	-	-	-
2.7. Dana Desa	206 940	206 940	193 400
<i>3. Lain-lain Pendapatan yang Sah</i>	42 920	96 430	86 860
JUMLAH	1 161 600	1 215 920	1 497 560

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 18
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	357 410	302 170	298 650
1. Belanja Bunga	0	160	2 150
2. Belanja Subsidi	0	2 930	-
3. Belanja Hibah	69 020	22 160	48 700
4. Belanja Bantuan Sosial	17 750	750	7 600
5. Belanja Bagi Hasil	0	0	-
6. Belanja Bantuan Keuangan	260 640	252 850	236 130
7. Belanja Lainnya	0	-	-
8. Pengeluaran Tidak Terduga	10 000	23 320	4 070
B. BELANJA LANGSUNG	864 390	945 050	1 107 480
1. Belanja Pegawai	378 290	409 680	373 110
2. Belanja Barang dan Jasa	364 860	382 270	578 720
3. Belanja Modal	121 240	153 100	155 650
JUMLAH	1 221 800	1 247 220	1 406 130

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 19
Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Mappi, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Penerimaan	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. PENDAPATAN DAERAH			
<i>1. Pendapatan Asli Daerah</i>	32 640	20 310	65 000
1.1. Pajak Daerah	3 040	3 400	2 470
1.2. Retribusi Daerah	980	620	670
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2 120	2 670	42 430
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	26 500	1 3620	19 430
<i>2. Dana Perimbangan</i>	1 095 200	1 135 280	1 406 240
2.1. Bagi Hasil Pajak	10 570	16 160	14 770
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	35 500	28 920	105 020
2.3. Dana Alokasi Umum	706 980	697 310	697 790
2.4. Dana Alokasi Khusus	153 770	199 470	260 770
2.5. Dana Otonomi Khusus	-	-	153 510
2.6. Dana Insentif Daerah	-	-	-
2.7. Dana Desa	188 380	193 420	174 380
<i>3. Lain-lain Pendapatan yang Sah</i>	84 190	125 770	11 340
JUMLAH	1 212 030	1 281 360	1 482 580

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 20
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Mappi 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	339 760	369 410	257 000
1. Belanja Bunga	0	-	-
2. Belanja Subsidi	0	-	-
3. Belanja Hibah	16 910	46 280	33 840
4. Belanja Bantuan Sosial	10 640	8 730	7 340
5. Belanja Bagi Hasil	0	-	-
6. Belanja Bantuan Keuangan	264 110	269 000	209 700
7. Belanja Lainnya	0	-	-
8. Pengeluaran Tidak Terduga	48 100	45 400	6 120
B. BELANJA LANGSUNG	934 700	875 430	1 019 210
1. Belanja Pegawai	414 320	270 890	311 710
2. Belanja Barang dan Jasa	302 010	363 410	403 840
3. Belanja Modal	218 370	241 130	303 660
JUMLAH	1 274 460	1 244 840	1 276 210

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 21
Realisasi Penerimaan Pemerintahan Kabupaten Asmat, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Penerimaan	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. PENDAPATAN DAERAH			
<i>1. Pendapatan Asli Daerah</i>	31 880	27 300	76 260
1.1. Pajak Daerah	4 450	4 050	4 580
1.2. Retribusi Daerah	10 230	6 450	19 160
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2 810	3 340	3 310
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	14 390	13 460	49 210
<i>2. Dana Perimbangan</i>	1 242 900	1 260 840	1 551 970
2.1. Bagi Hasil Pajak	11 630	15 810	14 730
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	35 500	28 780	102 610
2.3. Dana Alokasi Umum	826 840	815 870	815 870
2.4. Dana Alokasi Khusus	119 110	145 120	229 690
2.5. Dana Otonomi Khusus	-	-	156 150
2.6. Dana Insentif Daerah	-	-	-
2.7. Dana Desa	249 770	255 260	232 920
<i>3. Lain-lain Pendapatan yang Sah</i>	80 230	12 690	12 690
JUMLAH	1 355 010	1 300 830	1 640 920

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 22
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Asmat, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	488 300	428 920	450 350
1. Belanja Bunga	0	-	-
2. Belanja Subsidi	0	2 000	2 200
3. Belanja Hibah	115 980	29 540	106 790
4. Belanja Bantuan Sosial	25 050	55 240	19 790
5. Belanja Bagi Hasil	0	-	-
6. Belanja Bantuan Keuangan	337 260	336 840	318 530
7. Belanja Lainnya	0	-	-
8. Pengeluaran Tidak Terduga	10 010	5 300	3 040
B. BELANJA LANGSUNG	929 030	913 760	1 024 080
1. Belanja Pegawai	405 870	321 160	320 310
2. Belanja Barang dan Jasa	279 430	421 940	442 960
3. Belanja Modal	243 730	170 660	260 810
JUMLAH	1 417 330	1 342 680	1 474 430

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 23
Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Penerimaan	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. PENDAPATAN DAERAH			
<i>1. Pendapatan Asli Daerah</i>	40 760	41 060	36 170
1.1. Pajak Daerah	5 830	5 540	11 500
1.2. Retribusi Daerah	22 400	18 060	2 100
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3 000	3 680	3 650
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	9 530	13 780	18 920
<i>2. Dana Perimbangan</i>	864 680	825 220	1 133 460
2.1. Bagi Hasil Pajak	10 780	14 450	12 340
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	35 290	28 200	104 850
2.3. Dana Alokasi Umum	521 100	512 910	513 130
2.4. Dana Alokasi Khusus	158 790	132 040	233 690
2.5. Dana Otonomi Khusus	-	-	137 210
2.6. Dana Insentif Daerah	-	-	4 220
2.7. Dana Desa	138 720	137 620	128 020
<i>3. Lain-lain Pendapatan yang Sah</i>	163 040	42 240	56 620
JUMLAH	1 068 480	908 520	1 226 250

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 24
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	265 690	428 920	450 350
1. Belanja Bunga	430	-	-
2. Belanja Subsidi	0	2 000	2 200
3. Belanja Hibah	16 010	29 540	106 790
4. Belanja Bantuan Sosial	10 170	55 240	19 790
5. Belanja Bagi Hasil	0	-	-
6. Belanja Bantuan Keuangan	218 880	336 840	318 530
7. Belanja Lainnya	0	-	-
8. Pengeluaran Tidak Terduga	20 200	5 300	3 040
B. BELANJA LANGSUNG	717 360	913 760	1 024 080
1. Belanja Pegawai	345 150	321 160	320 310
2. Belanja Barang dan Jasa	224 300	421 940	442 960
3. Belanja Modal	147 910	170 660	260 810
JUMLAH	983 050	1 342 680	1 474 430

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 25
Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Penerimaan	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. PENDAPATAN DAERAH			
<i>1. Pendapatan Asli Daerah</i>	96 820	4 850	5 630
1.1. Pajak Daerah	570	380	110
1.2. Retribusi Daerah	0	40	30
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1 650	1 970	1 960
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	3 970	2 460	3 530
<i>2. Dana Perimbangan</i>	932 820	911 980	1 090 900
2.1. Bagi Hasil Pajak	11 510	16 530	15 000
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	35 340	28 260	104 170
2.3. Dana Alokasi Umum	674 150	667 260	669 250
2.4. Dana Alokasi Khusus	104 280	82 720	91 900
2.5. Dana Otonomi Khusus	-	-	139890
2.6. Dana Insentif Daerah	-	-	4 220
2.7. Dana Desa	107 540	117 210	70 690
<i>3. Lain-lain Pendapatan yang Sah</i>	25 300	10 790	45 510
JUMLAH	964 310	927 620	1 142 040

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 26
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	382 720	226 190	156 640
1. Belanja Bunga	3 310	5 690	-
2. Belanja Subsidi	6 490	8 200	3 500
3. Belanja Hibah	122 350	14 020	13 630
4. Belanja Bantuan Sosial	37 390	28 190	33 810
5. Belanja Bagi Hasil	0	-	-
6. Belanja Bantuan Keuangan	172 750	152 360	91 900
7. Belanja Lainnya	0	-	-
8. Pengeluaran Tidak Terduga	40 430	17 730	13 800
B. BELANJA LANGSUNG	721 570	592 440	597 760
1. Belanja Pegawai	288 360	183 510	196 470
2. Belanja Barang dan Jasa	308 550	330 100	303 190
3. Belanja Modal	124 660	78 830	98 100
JUMLAH	1 104 290	818 630	754 400

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 27
Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Dogiyai, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Penerimaan	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. PENDAPATAN DAERAH			
<i>1. Pendapatan Asli Daerah</i>	7 650	9 200	47 760
1.1. Pajak Daerah	30	2 480	2 910
1.2. Retribusi Daerah	100	-	-
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1 410	1 870	41 560
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	6 110	4 850	3 290
<i>2. Dana Perimbangan</i>	799 110	777 400	934 930
2.1. Bagi Hasil Pajak	8 460	13 120	12 060
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	35 290	28 470	101 460
2.3. Dana Alokasi Umum	461 020	454 360	454 620
2.4. Dana Alokasi Khusus	178 280	162 050	114 420
2.5. Dana Otonomi Khusus	-	-	154 930
2.6. Dana Insentif Daerah	-	-	3 320
2.7. Dana Desa	116 060	119 400	94 120
<i>3. Lain-lain Pendapatan yang Sah</i>	28 740	31 550	49 380
JUMLAH	835 500	818 150	1 032 070

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 28
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Dogiyai, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	243 200	202 240	217 890
1. Belanja Bunga	3 200	2 700	400
2. Belanja Subsidi	4 800	1 000	0
3. Belanja Hibah	26 620	11 660	46 610
4. Belanja Bantuan Sosial	3 650	7 510	16 640
5. Belanja Bagi Hasil	0	-	-
6. Belanja Bantuan Keuangan	170 910	169 380	144 860
7. Belanja Lainnya	0	-	-
8. Pengeluaran Tidak Terduga	34 020	9 990	9 380
B. BELANJA LANGSUNG	681 780	630 430	649 130
1. Belanja Pegawai	305 380	215 780	222 260
2. Belanja Barang dan Jasa	189 760	260 110	280 210
3. Belanja Modal	186 640	154 540	146 660
JUMLAH	924 980	832 670	867 020

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 29
Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Waropen, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Penerimaan	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. PENDAPATAN DAERAH			
<i>1. Pendapatan Asli Daerah</i>	7 990	5 950	6 920
1.1. Pajak Daerah	390	510	250
1.2. Retribusi Daerah	10	20	0
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1 800	2 320	-
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	5 790	3 100	6 670
<i>2. Dana Perimbangan</i>	806 340	768 950	929 770
2.1. Bagi Hasil Pajak	10 610	15 620	13 950
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	35 660	28 150	104 190
2.3. Dana Alokasi Umum	532 580	522 620	522 620
2.4. Dana Alokasi Khusus	110 590	97 460	85 070
2.5. Dana Otonomi Khusus	-	-	117 120
2.6. Dana Insentif Daerah	12 660	-	2 320
2.7. Dana Desa	104 240	105 100	84 500
<i>3. Lain-lain Pendapatan yang Sah</i>	21 560	10 460	2 850
JUMLAH	835 890	785 360	939 540

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 30
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Waropen, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	205 140	228 390	180 010
1. Belanja Bunga	0	2 820	250
2. Belanja Subsidi	430	0	0
3. Belanja Hibah	107 290	72 310	70 180
4. Belanja Bantuan Sosial	30 070	3 610	1 510
5. Belanja Bagi Hasil	0	0	-
6. Belanja Bantuan Keuangan	19 750	135 100	101 270
7. Belanja Lainnya	0	-	-
8. Pengeluaran Tidak Terduga	47 600	14 550	6 800
B. BELANJA LANGSUNG	426 600	584 820	503 450
1. Belanja Pegawai	190 750	203 270	176 660
2. Belanja Barang dan Jasa	151 430	273 960	292 970
3. Belanja Modal	84 420	107 590	33 820
JUMLAH	631 740	813 210	683 460

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 31
Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Penerimaan	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. PENDAPATAN DAERAH			
<i>1. Pendapatan Asli Daerah</i>	22 150	10 580	51 490
1.1. Pajak Daerah	160	130	40
1.2. Retribusi Daerah	440	1 290	1 360
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3 790	4 520	4 480
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	17 760	4 640	45 610
<i>2. Dana Perimbangan</i>	1 340 860	1 246 510	1 473 580
2.1. Bagi Hasil Pajak	10 360	14 970	14 680
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	30 740	35 650	117 350
2.3. Dana Alokasi Umum	779 530	764 630	764 630
2.4. Dana Alokasi Khusus	257 640	166 810	170 320
2.5. Dana Otonomi Khusus	-	-	168 640
2.6. Dana Insentif Daerah	-	-	-
2.7. Dana Desa	262 590	264 450	237 960
<i>3. Lain-lain Pendapatan yang Sah</i>	10 280	36 000	6 590
JUMLAH	1 373 290	1 293 090	1 531 660

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 32
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	242 140	404 400	154 580
1. Belanja Bunga	0	0	-
2. Belanja Subsidi	10 000	0	-
3. Belanja Hibah	96 350	17 150	53 170
4. Belanja Bantuan Sosial	27 790	30 990	14 340
5. Belanja Bagi Hasil	0	0	-
6. Belanja Bantuan Keuangan	87 890	347 200	80 760
7. Belanja Lainnya	0	-	-
8. Pengeluaran Tidak Terduga	20 110	9 060	6 310
B. BELANJA LANGSUNG	1 031 110	986 430	790 500
1. Belanja Pegawai	304 140	327 910	267 910
2. Belanja Barang dan Jasa	423 680	467 260	345 950
3. Belanja Modal	303 290	191 260	176 640
JUMLAH	1 273 250	1 390 830	945 080

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 33
Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Tolikara, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Penerimaan	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. PENDAPATAN DAERAH			
<i>1. Pendapatan Asli Daerah</i>	16 900	14 170	67 740
1.1. Pajak Daerah	0	-	1 800
1.2. Retribusi Daerah	0	-	60
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2 490	2 900	42 510
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	14 400	11 270	23 370
<i>2. Dana Perimbangan</i>	1 347 290	1 326 340	1 612 400
2.1. Bagi Hasil Pajak	9 240	13 360	12 770
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	26 730	28 220	104 850
2.3. Dana Alokasi Umum	692 350	677 980	677 980
2.4. Dana Alokasi Khusus	196 640	184 450	196 370
2.5. Dana Otonomi Khusus	-	-	205 840
2.6. Dana Insentif Daerah	-	-	-
2.7. Dana Desa	422 330	422 330	414 590
<i>3. Lain-lain Pendapatan yang Sah</i>	52 950	136 580	35 750
JUMLAH	1 417 140	1 477 090	1 715 890

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 34
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Tolikara, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	537 120	495 080	96 380
1. Belanja Bunga	0	-	-
2. Belanja Subsidi	10 000	5 000	8 640
3. Belanja Hibah	21 170	25 620	43 250
4. Belanja Bantuan Sosial	22 060	6 460	8 810
5. Belanja Bagi Hasil	0	-	-
6. Belanja Bantuan Keuangan	459 190	458 000	35 680
7. Belanja Lainnya	0	-	-
8. Pengeluaran Tidak Terduga	24 700	0	0
B. BELANJA LANGSUNG	906 130	987 770	999 960
1. Belanja Pegawai	243 610	272 380	291 590
2. Belanja Barang dan Jasa	429 440	481 000	401 060
3. Belanja Modal	233 080	234 390	307 310
JUMLAH	1 443 250	1 482 850	1 096 340

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 35
Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Yalimo, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Penerimaan	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. PENDAPATAN DAERAH			
<i>1. Pendapatan Asli Daerah</i>	8 980	11 490	8 910
1.1. Pajak Daerah	2 620	4 400	5 510
1.2. Retribusi Daerah	50	0	0
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	460	540	530
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	5 850	6 550	2 870
<i>2. Dana Perimbangan</i>	1 058 060	962 730	1 136 910
2.1. Bagi Hasil Pajak	7 330	11 680	11 820
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	35 290	28 200	104 850
2.3. Dana Alokasi Umum	573 710	561 980	561 980
2.4. Dana Alokasi Khusus	174 090	73 330	82 450
2.5. Dana Otonomi Khusus	-	-	152 840
2.6. Dana Insentif Daerah	21 010	40 910	-
2.7. Dana Desa	246 630	246 630	222 970
<i>3. Lain-lain Pendapatan yang Sah</i>	21 950	30 650	55 570
JUMLAH	1 088 990	1 004 870	1 201 390

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 36
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Yalimo, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	463 010	400 340	115 290
1. Belanja Bunga	0	-	-
2. Belanja Subsidi	0	0	1 200
3. Belanja Hibah	112 190	86 170	15 920
4. Belanja Bantuan Sosial	26 440	840	8 810
5. Belanja Bagi Hasil	0	-	-
6. Belanja Bantuan Keuangan	314 450	311 930	61 330
7. Belanja Lainnya	0	-	-
8. Pengeluaran Tidak Terduga	9 930	1 400	150
B. BELANJA LANGSUNG	607 560	625 360	705 880
1. Belanja Pegawai	236 910	207 650	225 220
2. Belanja Barang dan Jasa	216 720	260 730	314 080
3. Belanja Modal	153 930	156 980	166 580
JUMLAH	1 070 570	1 025 700	821 170

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 37
Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Penerimaan	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. PENDAPATAN DAERAH			
<i>1. Pendapatan Asli Daerah</i>	15 020	18 370	12 480
1.1. Pajak Daerah	790	910	910
1.2. Retribusi Daerah	800	2 750	1 030
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3 510	4 210	4 300
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	9 920	10 500	6 240
<i>2. Dana Perimbangan</i>	1 112 560	1 141 910	1 385 310
2.1. Bagi Hasil Pajak	9 410	14 010	12 960
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	26 560	28 200	104 850
2.3. Dana Alokasi Umum	701 990	690 480	690 770
2.4. Dana Alokasi Khusus	71 190	118 400	110 640
2.5. Dana Otonomi Khusus	-	-	191 100
2.6. Dana Insentif Daerah	12 590	-	-
2.7. Dana Desa	290 820	290 820	274 990
<i>3. Lain-lain Pendapatan yang Sah</i>	41 750	25 140	10 990
JUMLAH	1 169 330	1 185 420	1 408 780

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 38
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	539 120	506 190	198 140
1. Belanja Bunga	0	-	-
2. Belanja Subsidi	0	-	0
3. Belanja Hibah	6 700	13 830	1 250
4. Belanja Bantuan Sosial	146 960	14 160	100 140
5. Belanja Bagi Hasil	0	-	-
6. Belanja Bantuan Keuangan	371 260	363 260	72 960
7. Belanja Lainnya	0	-	-
8. Pengeluaran Tidak Terduga	14 200	114 940	23 790
B. BELANJA LANGSUNG	686 220	794 070	702 820
1. Belanja Pegawai	279 540	321 390	269 550
2. Belanja Barang dan Jasa	329 970	352 060	275 150
3. Belanja Modal	76 710	120 620	158 120
JUMLAH	1 225 340	1 300 260	900 960

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 39
Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Penerimaan	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. PENDAPATAN DAERAH			
<i>1. Pendapatan Asli Daerah</i>	10 540	9 760	3 850
1.1. Pajak Daerah	1 020	1 970	40
1.2. Retribusi Daerah	300	40	-
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	340	390	390
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	8 880	7 360	3 420
<i>2. Dana Perimbangan</i>	833 380	81 570	965 440
2.1. Bagi Hasil Pajak	8 210	12 160	11 570
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	35 380	28 430	104 840
2.3. Dana Alokasi Umum	605 100	592 700	592700
2.4. Dana Alokasi Khusus	90 570	84 440	65 180
2.5. Dana Otonomi Khusus	-	-	136 860
2.6. Dana Insentif Daerah	-	-	-
2.7. Dana Desa	94 120	97 970	54 290
<i>3. Lain-lain Pendapatan yang Sah</i>	48 310	19 740	42 410
JUMLAH	892 230	845 200	1 011 700

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 40
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	211 890	195 550	70 930
1. Belanja Bunga	0	0	-
2. Belanja Subsidi	0	0	-
3. Belanja Hibah	5 000	14 430	35 120
4. Belanja Bantuan Sosial	95 430	66 030	24 690
5. Belanja Bagi Hasil	0	-	-
6. Belanja Bantuan Keuangan	109 160	112 800	11 120
7. Belanja Lainnya	0	-	-
8. Pengeluaran Tidak Terduga	2 300	2 290	-
B. BELANJA LANGSUNG	739 560	734 820	139 140
1. Belanja Pegawai	165 710	219 740	104 030
2. Belanja Barang dan Jasa	347 880	318 310	21 110
3. Belanja Modal	225 970	196 770	14 000
JUMLAH	951 450	930 370	210 070

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 41
Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Paniai, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Penerimaan	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. PENDAPATAN DAERAH			
<i>1. Pendapatan Asli Daerah</i>	24 280	18 140	13 200
1.1. Pajak Daerah	1 050	1 740	890
1.2. Retribusi Daerah	380	250	70
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1 210	1 480	1 470
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	21 640	14 670	10 770
<i>2. Dana Perimbangan</i>	989 430	987 360	1 196 560
2.1. Bagi Hasil Pajak	9 670	14 270	12 260
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	27 380	28 310	100 350
2.3. Dana Alokasi Umum	541 510	538 890	538 890
2.4. Dana Alokasi Khusus	211 670	204 800	190 130
2.5. Dana Otonomi Khusus	-	-	164 890
2.6. Dana Insentif Daerah	-	-	1 190
2.7. Dana Desa	199 200	201 090	190 040
<i>3. Lain-lain Pendapatan yang Sah</i>	53 030	41 960	51 860
JUMLAH	1 066 740	1 047 460	1 262 810

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 42
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Paniai, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	378 520	357 610	355 910
1. Belanja Bunga	0	-	-
2. Belanja Subsidi	0	3 490	-
3. Belanja Hibah	31 130	69 060	107 170
4. Belanja Bantuan Sosial	34 330	20 090	48 610
5. Belanja Bagi Hasil	0	-	-
6. Belanja Bantuan Keuangan	278 820	258 320	198 300
7. Belanja Lainnya	0	-	-
8. Pengeluaran Tidak Terduga	34 240	6 650	1 830
B. BELANJA LANGSUNG	823 530	779 710	780 370
1. Belanja Pegawai	245 880	248 920	268 160
2. Belanja Barang dan Jasa	370 700	343 310	335 360
3. Belanja Modal	206 950	187 480	176 850
JUMLAH	1 202 050	1 137 320	1 136 280

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 43
Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Nduga, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Penerimaan	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. PENDAPATAN DAERAH			
<i>1. Pendapatan Asli Daerah</i>	6 500	6 170	4 240
1.1. Pajak Daerah	320	1 330	750
1.2. Retribusi Daerah	230	230	570
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1 090	1 270	1 250
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	4 860	3 340	800
<i>2. Dana Perimbangan</i>	949 090	880 900	1 231 250
2.1. Bagi Hasil Pajak	7 570	12 190	11 970
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	35 290	28 200	99 260
2.3. Dana Alokasi Umum	572 100	560 390	560 570
2.4. Dana Alokasi Khusus	117 670	63 660	186 440
2.5. Dana Otonomi Khusus	-	-	166 250
2.6. Dana Insentif Daerah	-	-	-
2.7. Dana Desa	216 460	216 460	206 760
<i>3. Lain-lain Pendapatan yang Sah</i>	13 410	23 600	47 550
JUMLAH	969 000	910 670	1 283 040

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 44
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Nduga, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	383 640	429 210	111 440
1. Belanja Bunga	10 330	5 440	3 200
2. Belanja Subsidi	1 020	2 640	2 120
3. Belanja Hibah	16 700	14 500	9 690
4. Belanja Bantuan Sosial	66 440	108 100	52 100
5. Belanja Bagi Hasil	0	-	-
6. Belanja Bantuan Keuangan	257 760	265 830	28 820
7. Belanja Lainnya	0	-	-
8. Pengeluaran Tidak Terduga	31 390	32 700	15 510
B. BELANJA LANGSUNG	537 730	630 870	580 260
1. Belanja Pegawai	137 000	151 940	107 140
2. Belanja Barang dan Jasa	257 060	331 230	299 270
3. Belanja Modal	143 670	147 700	173 850
JUMLAH	921 370	1 060 080	691 700

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 45
Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Supiori, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Penerimaan	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. PENDAPATAN DAERAH			
<i>1. Pendapatan Asli Daerah</i>	10 010	10 900	7 260
1.1. Pajak Daerah	1 580	1 270	710
1.2. Retribusi Daerah	180	270	160
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1 460	1 850	1 830
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	6 790	7 510	4 560
<i>2. Dana Perimbangan</i>	578 220	570 180	752 750
2.1. Bagi Hasil Pajak	8 380	12 840	11 690
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	35 290	28 200	104 850
2.3. Dana Alokasi Umum	416 490	408 330	408 330
2.4. Dana Alokasi Khusus	74 710	76 640	90 980
2.5. Dana Otonomi Khusus	-	-	105 460
2.6. Dana Insentif Daerah	-	-	2 070
2.7. Dana Desa	43 350	44 170	29 370
<i>3. Lain-lain Pendapatan yang Sah</i>	11 750	15 390	45 630
JUMLAH	599 980	596 470	805 640

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 46
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Supiori, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	131 690	90 790	52 300
1. Belanja Bunga	0	0	-
2. Belanja Subsidi	0	0	-
3. Belanja Hibah	25 410	9 550	9 090
4. Belanja Bantuan Sosial	12 860	7 550	13 740
5. Belanja Bagi Hasil	0	0	-
6. Belanja Bantuan Keuangan	83 230	73 010	28 970
7. Belanja Lainnya	0	-	-
8. Pengeluaran Tidak Terduga	10 190	680	500
B. BELANJA LANGSUNG	537 730	555 810	499 380
1. Belanja Pegawai	137 000	229 580	230 110
2. Belanja Barang dan Jasa	257 060	213 420	155 280
3. Belanja Modal	143 670	112 810	113 990
JUMLAH	639 620	646 600	551 680

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 47
Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Puncak, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Penerimaan	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. PENDAPATAN DAERAH			
<i>1. Pendapatan Asli Daerah</i>	18 420	6 740	500
1.1. Pajak Daerah	0	-	-
1.2. Retribusi Daerah	80	0	0
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4 110	1 490	0
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	14 230	5 250	500
<i>2. Dana Perimbangan</i>	1 066 070	1 079 780	1 386 840
2.1. Bagi Hasil Pajak	8 560	13 540	12 980
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	35 630	28 250	100 670
2.3. Dana Alokasi Umum	748 280	736 190	736 250
2.4. Dana Alokasi Khusus	60 190	82 150	178 290
2.5. Dana Otonomi Khusus	-	-	178 840
2.6. Dana Insentif Daerah	-	-	-
2.7. Dana Desa	213 410	219 650	179 810
<i>3. Lain-lain Pendapatan yang Sah</i>	113 120	146 490	52 180
JUMLAH	1 197 610	1 233 010	1 439 520

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 48
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Puncak, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	335 660	329 020	163 440
1. Belanja Bunga	9 080	3 610	50
2. Belanja Subsidi	3 450	0	0
3. Belanja Hibah	32 740	48 650	53 250
4. Belanja Bantuan Sosial	26 440	10 650	13 230
5. Belanja Bagi Hasil	0	-	-
6. Belanja Bantuan Keuangan	249 210	23 640	77 250
7. Belanja Lainnya	0	-	-
8. Pengeluaran Tidak Terduga	14 740	29 710	19 660
B. BELANJA LANGSUNG	816 840	839 550	1 066 160
1. Belanja Pegawai	283 320	283 850	309 180
2. Belanja Barang dan Jasa	442 460	463 260	499 460
3. Belanja Modal	91 060	92 440	257 520
JUMLAH	1 152 500	1 168 570	1 229 600

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 49
Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Penerimaan	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. PENDAPATAN DAERAH			
<i>1. Pendapatan Asli Daerah</i>	61 620	41 610	46 730
1.1. Pajak Daerah	12 260	14 450	15 500
1.2. Retribusi Daerah	12 800	14 370	11 440
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2 550	3 000	0
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	34 010	9 790	19 790
<i>2. Dana Perimbangan</i>	1 125 240	1 202 720	1 514 760
2.1. Bagi Hasil Pajak	11 490	18 170	14 430
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	26 730	28 220	104 850
2.3. Dana Alokasi Umum	673 340	662 520	662 520
2.4. Dana Alokasi Khusus	128 690	211 820	283 160
2.5. Dana Otonomi Khusus	-	-	186 190
2.6. Dana Insentif Daerah	3 000	-	-
2.7. Dana Desa	281 990	281 990	263 610
<i>3. Lain-lain Pendapatan yang Sah</i>	100 800	123 940	103 160
JUMLAH	1 287 660	1 368 270	1 664 650

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 50
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	460 960	401 780	390 020
1. Belanja Bunga	0	-	-
2. Belanja Subsidi	9 230	-	-
3. Belanja Hibah	41 840	20 400	22 490
4. Belanja Bantuan Sosial	7 470	13 220	15 340
5. Belanja Bagi Hasil	2 950	2 950	1 230
6. Belanja Bantuan Keuangan	352 170	344 510	347 800
7. Belanja Lainnya	0	-	-
8. Pengeluaran Tidak Terduga	47 300	2 070	3 160
B. BELANJA LANGSUNG	870 390	947 180	946 960
1. Belanja Pegawai	397 440	329 060	332 890
2. Belanja Barang dan Jasa	266 640	394 310	378 020
3. Belanja Modal	206 310	223 810	236 050
JUMLAH	1 331 350	1 348 960	1 336 980

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 51
Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Penerimaan	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. PENDAPATAN DAERAH			
<i>1. Pendapatan Asli Daerah</i>	20 770	19 260	11 030
1.1. Pajak Daerah	1 730	3 280	2 020
1.2. Retribusi Daerah	1 680	1 290	2 760
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	850	980	980
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	16 510	13 710	5 270
<i>2. Dana Perimbangan</i>	1 284 220	1 342 310	1 677 190
2.1. Bagi Hasil Pajak	9 950	14 830	13 670
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	35 290	28 200	104 850
2.3. Dana Alokasi Umum	687 760	695 670	695 670
2.4. Dana Alokasi Khusus	131 870	194 460	221 720
2.5. Dana Otonomi Khusus	-	-	214 240
2.6. Dana Insentif Daerah	10 200	-	-
2.7. Dana Desa	409 150	409 150	427 040
<i>3. Lain-lain Pendapatan yang Sah</i>	43 860	92 690	138 160
JUMLAH	1 348 850	1 454 260	1 826 380

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 52
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Yahukimo, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	687 460	632 190	604 980
1. Belanja Bunga	0	-	-
2. Belanja Subsidi	240	1 000	0
3. Belanja Hibah	121 480	119 790	167 190
4. Belanja Bantuan Sosial	11 440	13 280	3 610
5. Belanja Bagi Hasil	0	-	-
6. Belanja Bantuan Keuangan	483 120	490 260	431 260
7. Belanja Lainnya	0	-	-
8. Pengeluaran Tidak Terduga	71 180	7 860	2 920
B. BELANJA LANGSUNG	768 890	877 860	748 020
1. Belanja Pegawai	400 370	338 110	292 560
2. Belanja Barang dan Jasa	251 220	361 170	261 140
3. Belanja Modal	117 300	178 580	194 320
JUMLAH	1 456 350	1 510 050	1 353 000

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 53
Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Penerimaan	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. PENDAPATAN DAERAH			
<i>1. Pendapatan Asli Daerah</i>	14 340	9 570	5 360
1.1. Pajak Daerah	270	2 700	1 090
1.2. Retribusi Daerah	340	430	380
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	820	950	940
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	12 910	5 490	2 950
<i>2. Dana Perimbangan</i>	1 101 370	1 113 330	1 534 800
2.1. Bagi Hasil Pajak	7 690	11 940	11 480
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	35 290	28 200	104 850
2.3. Dana Alokasi Umum	610 080	597 590	597 590
2.4. Dana Alokasi Khusus	102 250	129 540	295 650
2.5. Dana Otonomi Khusus	-	-	191 230
2.6. Dana Insentif Daerah	-	-	-
2.7. Dana Desa	346 060	346 060	334 000
<i>3. Lain-lain Pendapatan yang Sah</i>	29 750	51 020	49 170
JUMLAH	1 145 460	1 173 920	1 589 330

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN).

Tabel 54
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	532 520	480 920	111 920
1. Belanja Bunga	0	-	-
2. Belanja Subsidi	3 500	2 500	2 600
3. Belanja Hibah	13 700	24 540	16 540
4. Belanja Bantuan Sosial	54 230	34 780	49 050
5. Belanja Bagi Hasil	0	-	0
6. Belanja Bantuan Keuangan	427 090	396 100	31 730
7. Belanja Lainnya	0	-	-
8. Pengeluaran Tidak Terduga	340 000	23 000	12 000
B. BELANJA LANGSUNG	707 220	794 580	736 910
1. Belanja Pegawai	299 850	232 930	224 510
2. Belanja Barang dan Jasa	272 770	363 870	314 390
3. Belanja Modal	134 600	197 780	198 010
JUMLAH	1 239 740	1 275 500	848 830

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 55
Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Penerimaan	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. PENDAPATAN DAERAH			
<i>1. Pendapatan Asli Daerah</i>	17 040	24 550	24 090
1.1. Pajak Daerah	5 390	12 930	15 520
1.2. Retribusi Daerah	0	40	180
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	700	820	810
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	10 950	10 760	7 580
<i>2. Dana Perimbangan</i>	885 440	977 960	1 088 690
2.1. Bagi Hasil Pajak	8 990	12 500	13 490
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	26 560	28 200	101 840
2.3. Dana Alokasi Umum	641 350	629 060	629 500
2.4. Dana Alokasi Khusus	66 060	158 970	84 750
2.5. Dana Otonomi Khusus	-	-	154 940
2.6. Dana Insentif Daerah	-	-	-
2.7. Dana Desa	142 480	149 230	104 170
<i>3. Lain-lain Pendapatan yang Sah</i>	13 030	17 190	50 220
JUMLAH	915 510	1 019 700	1 163 000

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 56
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	304 500	282 940	283 550
1. Belanja Bunga	0	0	-
2. Belanja Subsidi	10 590	4 570	850
3. Belanja Hibah	47 250	45 090	46 200
4. Belanja Bantuan Sosial	25 050	46 250	28 060
5. Belanja Bagi Hasil	0	162 560	-
6. Belanja Bantuan Keuangan	165 090	0	161 960
7. Belanja Lainnya	0	-	-
8. Pengeluaran Tidak Terduga	56 520	24 470	46 480
B. BELANJA LANGSUNG	701 800	782 310	839 850
1. Belanja Pegawai	239 940	259 890	271 770
2. Belanja Barang dan Jasa	299 070	284 670	369 040
3. Belanja Modal	162 790	237 750	199 040
JUMLAH	1 006 300	1 065 250	1 123 400

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 57
Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Deiyai, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Penerimaan	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. PENDAPATAN DAERAH			
<i>1. Pendapatan Asli Daerah</i>	2 710	4 860	53 070
1.1. Pajak Daerah	230	390	1 750
1.2. Retribusi Daerah	-	10	-
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	560	700	40.470
1.4 Lain-lain PAD yang Sah	1 920	3 760	10 850
<i>2. Dana Perimbangan</i>	753 350	716 890	924 020
2.1. Bagi Hasil Pajak	11 520	16 640	13 640
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	35 290	28 200	100 180
2.3. Dana Alokasi Umum	456 140	447 050	447 600
2.4. Dana Alokasi Khusus	156 690	128 690	146 380
2.5. Dana Otonomi Khusus	-	-	143.360
2.6. Dana Insentif Daerah	-	-	1 190
2.7. Dana Desa	93 710	96 310	71 670
<i>3. Lain-lain Pendapatan yang Sah</i>	16 170	20 750	21 790
JUMLAH	772 230	742 500	998 880

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

Tabel 58
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Deiyai, 2020 - 2022
(Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	200 800	197 260	221 730
1. Belanja Bunga	5 810	2 600	4 070
2. Belanja Subsidi	0	-	-
3. Belanja Hibah	27 870	32 700	69 880
4. Belanja Bantuan Sosial	-	15 830	12 870
5. Belanja Bagi Hasil	0	-	-
6. Belanja Bantuan Keuangan	143 290	144 510	126 310
7. Belanja Lainnya	-	-	-
8. Pengeluaran Tidak Terduga	23 830	1 620	8 600
B. BELANJA LANGSUNG	607 460	622 660	699 870
1. Belanja Pegawai	178 340	201 200	212 060
2. Belanja Barang dan Jasa	301 370	278 850	336 180
3. Belanja Modal	127 750	142 610	151 630
JUMLAH	808 260	819 920	921 600

* : APBD

Sumber: DJPK (DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN)

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA**

Jl. Dr. Sam Ratulangi Dok 2 Atas Jayapura 99112

Telp: 0967-5165 999 / 5196 107

homepage: <http://papua.bps.go.id>

Email: bps9400@bps.go.id